



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Laporan ALCO Regional

s.d 31 Mei 2022

Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Utara





Ringkasan Eksekutif



Realisasi APBN Regional

s.d. 31 Mei 2022 total pendapatan **Rp15,72 T** dan total belanja **Rp21,24 T** sehingga menghasilkan **Defisit regional sebesar Rp5,52 T**



Deviasi realisasi Penerimaan atas proyeksi

Total deviasi sisi Pendapatan *understated* sebesar **Rp 489,6 miliar**, disebabkan oleh:
DJP (pajak) : **(Rp26,03 M)/-241,84%**
DJCB (bea cukai) : **(Rp340,45 M)/-68,13%**
PNBP/Hibah : **(Rp123,12 M)/-117,81%**



Deviasi realisasi Pengeluaran atas proyeksi

Total deviasi sisi Belanja *understated* **Rp1,38 triliun** disebabkan oleh:
Belanja K/L: **(Rp531,29 M)/- 29,92%**
TKDD: **(Rp845,82 M)/-26,11%**



Realisasi I-Account APBD

s.d. 31 Mei 2022 mencapai Pendapatan **Rp10,69 T**, Belanja **Rp8,60 T** dan Pembiayaan Daerah **Rp0,10 T** dan akumulasi **SiLPA Rp18,82 T**



Kontribusi TKDD pada APBD

Realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD s.d 31 Mei 2022 sebesar **Rp6,94 T** (17,7% dari pagu) dengan kontribusi sebesar **66,02%** dari total Realisasi APBD



Perkembangan Ekonomi Regional

PDB Regional pada tw IV 2021 **Terkontraksi sebesar 3,81%** dibandingkan triwulan sebelumnya.
Februari 2022, Inflasi Sumatera Utara **sebesar 0,74% (m-to-m)**.
Bea Keluar tumbuh didorong kinerja dari pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sejak akhir 2020.



Strategic Issues

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, belum terdapat data realisasi PEN. Pembangunan Bandara di Mandailing Natal, Pembangunan Jalan akses KSPN Danau Toba dan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat mempercepat laju perekonomian di Sumut



Policy Response

Terhadap kebijakan peningkatan tarif perpajakan, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta assessment dampak kenaikan Tarif perpajakan tersebut terhadap tingkat konsumsi masyarakat



STRATEGIC DASHBOARD ALCo REGIONAL s.d 31 Mei 2022

COVID UNCERTAINTY

Dinamika Covid terus berlanjut namun lebih terkendali

Covid Updates :

PPKM Level 1 Berlanjut, Situasi Membaik



- Kasus Covid-19 di Prov. Sumatra Utara terus membaik akibat kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah
- Jumlah vaksinasi dosis 1 : 10,92 juta (95,63%)
- Jumlah vaksinasi dosis 2 : 9,29 juta (81,38%)
- Jumlah vaksinasi dosis 3 : 2,41 juta (21,07%)

Neraca Perdagangan:

Kinerja Neraca perdagangan pada regional Sumatra Utara semakin baik (m-to-m)



Ekspor

Ekspor ↑



Impor

Impor ↓

Inflow kembali meningkat meski tetap volatile

Fiskal : Percepatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah didukung

perbaikan kinerja pajak dan posisi kas yang likuid menjadi stimulus akselerasi PDB hingga Mei 2022



-TAX-
Pajak Daman Negeri Tumbuh

PPh 21, Impor, Badan ↑
PPN ↑



Bea Cukai Ditopang BK

BK ↑
BM ↑
Cukai ↓



PNBP Mulai tumbuh

PNBP Lainnya ↑



Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh

Barang ↓
Modal ↓
Pegawai ↑



Penyerapan dana TKDD tumbuh

DAU ↑
DBH ↓

Sektor Riil : Pemulihan konsumsi RT dan aktivitas korporasi membaik seiring dengan terkendalinya Covid-19.



Konsumsi RT membaik

- Mobilitas mulai pulih
- IKK dan Indeks penjualan ritel membaik



Investasi PMTB

- Impor barang modal menurun
- Investasi tertahan PPKM



Deflasi

- Inflasi Mei naik ke 0,74%
- Inflasi volatile food inflasi 0,94%

Risiko-Risiko

1. Risiko Pandemi Covid dan program vaksinasi
 - Peningkatan tren kasus Covid 19
 - Adanya varian baru
 - Kecepatan vaksinasi
2. Risiko Penerimaan Perpajakan
3. Risiko Realisasi Percepatan Belanja
4. Risiko lainnya.

Rekomendasi ALCo Regional



Normal



Perlu Perhatian



Perlu Perhatian Lebih Lanjut



Perlu Penanganan Khusus



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

APBN





Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 31 Mei 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	2021			2022			Growth (%)	
	Pagu	realisasi s.d Mei	% Real	APBN-P	realisasi s.d Mei	% Real		
A. Pendapatan dan Hibah	28,653.74	6,298.97	21.98%	27,616.60	15,715.88	56.91%	149.50%	▲
I. Penerimaan Dalam Negeri	28,653.74	6,298.97	21.98%	27,616.60	15,715.88	56.91%	149.50%	▲
1. Penerimaan Perpajakan	25,219.45	3,935.20	15.60%	23,610.22	12,373.95	52.41%	214.44%	▲
2. Kepabeanan & Cukai	1,768.39	1,979.17	111.92%	2,123.09	2,587.97	121.90%	30.76%	▲
II. PNBP	1,665.89	384.61	23.09%	1,883.29	753.96	40.03%	96.03%	▲
B. Belanja Negara	61,235.92	23,064.88	37.67%	59,844.37	21,239.50	35.49%	-7.91%	▼
I. Belanja Pemerintah Pusat	21,074.06	6,717.87	31.88%	19,997.63	6,199.20	31.00%	-7.72%	▼
1. Belanja K/L	21,074.06	6,717.87	31.88%	19,997.63	6,199.20	31.00%	-7.72%	▼
2. Belanja Non K/L								
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	40,161.86	16,347.01	40.70%	39,846.75	15,040.30	37.75%	-7.99%	▼
A. Transfer ke Daerah	35,636.57	15,362.82	43.11%	35,449.96	13,839.49	39.04%	-9.92%	▼
B. Dana Desa	4,525.29	984.19	21.75%	4,396.78	1,200.81	27.31%	22.01%	▲
C. Keseimbangan Primer								
D. Surplus/Defisit Anggaran	-32,582.18	-16,765.91	51.46%	-32,227.78	-5,523.62	17.14%	-67.05%	▼
% thd PDB								
E. Pembiayaan Anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	▲
SILPA/(SiKPA)								

Kinerja APBN s.d. Mei 2022 (YoY)

- Pendapatan Wilayah Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar Rp9,42 Triliun atau naik sebesar 149,50% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
- Kenaikan tersebut paling besar disumbang oleh PPh non migas yang naik sebesar Rp4,74 T (100,22%)

Kinerja Belanja APBN s.d. Mei 2022 (YoY)

- Belanja K/L mengalami kontraksi sebesar Rp0,52 T turun 7,72% dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan terjadi penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,36 T atau turun 28,84% dibanding tahun sebelumnya
- TKDD turun 7,99% atau sebesar Rp1,31 T, yang disebabkan realisasi DBH yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 79,50% atau sebesar Rp0,69 T dibanding tahun sebelumnya, serta DAK Non-Fisik yang terkontraksi sebesar 36,73% atau turun sebesar 1,37 T

Sumber : aplikasi OM-SPAN, aplikasi SIMTRADA, Kanwil DJP Sumut dan Kanwil DJBC Sumut (diolah)



KINERJA PNBP s.d 30 MEI 2022

Realisasi PNBP s.d Mei 2022 Rp509,08 miliar



5 jenis pendapatan PNBP tertinggi per Mei 2022

No	Akun	Pendapatan
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	113.38
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	98.58
3	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	62.17
4	Pendapatan Biaya Pendidikan	50.01
5	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	46.49

Realisasi PNBP sampai dengan Mei 2022 telah terealisasi 63,63% dari target. Realisasi tersebut naik 124,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sumber : aplikasi OM-SPAN

Penerimaan PNBP per K/L



KEPOLISIAN

Rp189,74 M



MENHAN

Rp136,98 M



MENDIKNAS

Rp116,64 M



MENKES

Rp86,10 M



PERHUBUNGAN

Rp63,42M



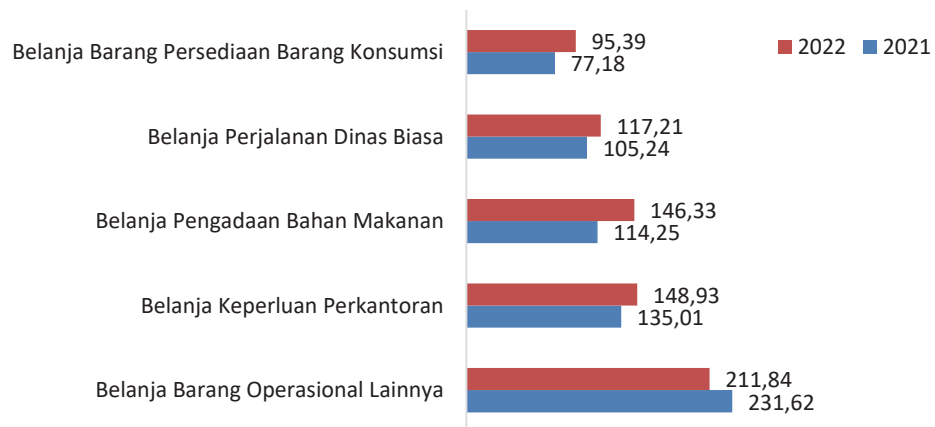


CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 31 MEI 2022

Realisasi Belanja Barang s.d Mei 2022 Rp1.824,50 miliar



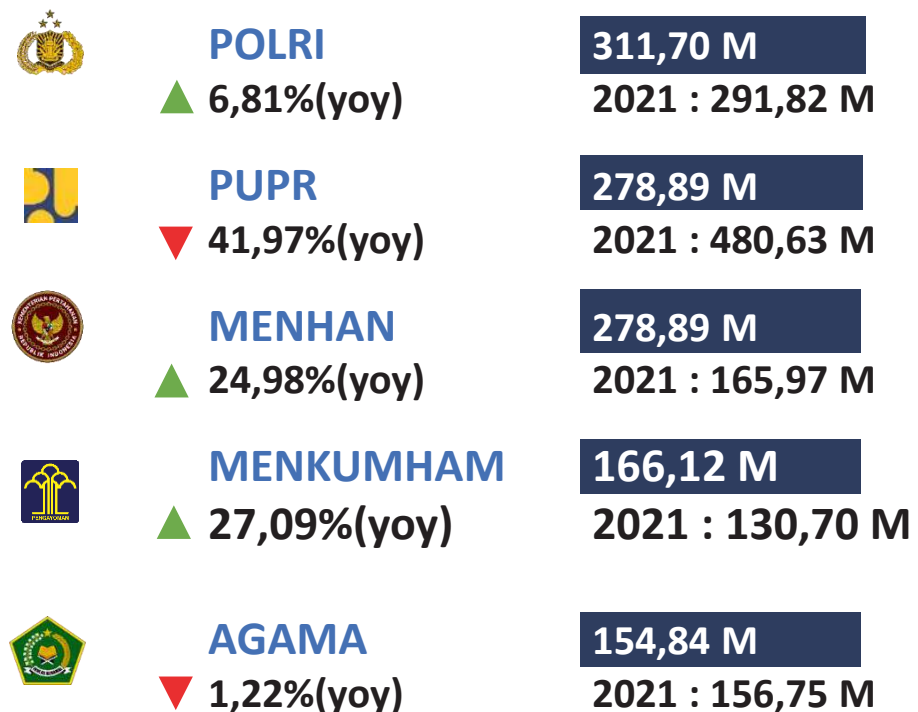
Realisasi Belanja Barang Terbesar per Akun



Realisasi belanja barang s.d Mei tahun 2022 terkontraksi 9,85% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Barang didominasi oleh Belanja Operasional sebesar Rp211,84 miliar (terkontraksi 8,54% dibandingkan tahun sebelumnya)

Sumber : aplikasi OM-SPAN

Kinerja Belanja Barang K/L



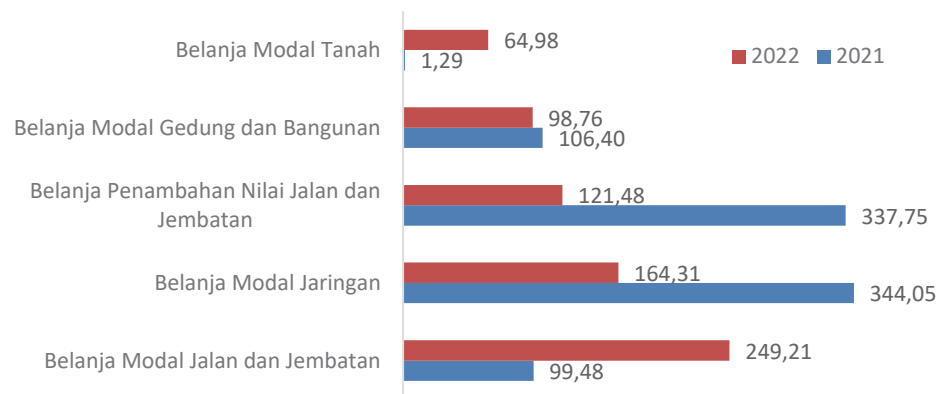


CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 31 MEI 2022

Realisasi Belanja Modal Rp878,64 miliar



Realisasi Belanja modal Terbesar per Akun



Realisasi belanja modal Mei tahun 2022 turun 28,78%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal tanah yakni tumbuh sebesar 4.942% atau sebesar Rp63,70 miliar, disusul Belanja Modal Jalandan jembatan sebesar 150,51% atau tumbuh sebesar Rp149,73 miliar

Kinerja Belanja Modal K/L



MENHUB

▲ 268,78%(yoy)

Rp379,78 M

2021 : Rp102,91 M



PUPR

▼ 64,23%(yoy)

Rp333,74 M

2021 : Rp932,95 M



MENHAN

▲ 5,01%(yoy)

Rp59,64 M

2021 : Rp56,79 M



PARIWISATA

▼ 29,16%(yoy)

Rp30,99 M

2021 : Rp43,75 M



MENAG

▲ 27,95%(yoy)

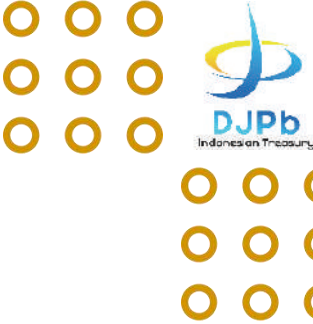
Rp30,62 M

2021 : Rp23,93 M

- Turunnya realisasi Belanja Modal s.d bulan Mei 2022 dibanding periode yang sama tahun 2021 merupakan dampak dari penurunan Pagu di tahun 2022 yakni turun sebesar 44,17%, salah satunya adalah Kementerian Pariwisata yang mengalami penurunan pagu sebesar 27,28%.
- Salah satu penyebab penurunan realisasi kementerian PUPR adalah SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara terkendala kompetensi SDM dalam hal revisi dan Pencairan dana Loan, dengan realisasi s.d Akhir Mei 2021 sekitar 30%, di tahun 2022 periode yang sama sebesar 22,5%.

Sumber : aplikasi OM-SPAN

Paparan ALCO Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Mei 2022



CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 31 MEI 2022

Realisasi TKDD s.d 31 MEI 2022

1. Belanja yang bersumber dari TKDD telah terealisasi sebesar 37,75% atau senilai 15,04 triliun dari pagu sebesar Rp39,85 triliun.
2. Penyaluran dana transfer untuk DAK Fisik telah terealisasi Rp52,33 miliar atau sebesar 1,71%.



Sumber : aplikasi OM-SPAN dan SIMTRADA (diolah)



Rincian Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 31 MEI 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	2021			2022			Growth (%)
	Pagu	Real s.d Mei	%Real	Pagu	Real s.d Mei	% Real	
A. Pendapatan dan Hibah	28,653.74	6,298.97	21.98%	27,616.60	15,715.88	56.91%	149.50%
I. Penerimaan Dalam Negeri	28,653.74	6,298.97	21.98%	27,616.60	15,715.88	56.91%	149.50%
1. Penerimaan Perpajakan	26,987.84	5,914.36	21.91%	25,733.31	14,961.92	58.14%	152.98%
a. Pajak Dalam Negeri	26,177.18	4,397.17	16.80%	24,410.77	12,782.36	52.36%	190.70%
i. Pajak Penghasilan	13,263.57	2,203.63	16.61%	12,104.79	9,470.09	78.23%	329.75%
- Migas	0.00	0.06		0.00	0.00		-99.08%
- Non Migas	13,263.57	4,729.90	35.66%	12,104.79	9,470.09	78.23%	100.22%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	11,055.95	1,544.64	13.97%	10,461.70	2,785.51	26.63%	80.33%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	520.99	49.16	9.44%	729.31	11.29	1.55%	-77.04%
v. Cukai	957.73	461.97	48.24%	800.55	408.41	51.02%	-11.59%
vi. Pajak Lainnya	378.94	137.77	36.36%	314.43	107.06	34.05%	-22.29%
b. Pajak Perdagangan Internasional	810.67	1,517.19	187.15%	1,322.54	2,179.57	164.80%	43.66%
i. Bea Masuk	747.54	379.31	50.74%	783.05	394.45	50.37%	3.99%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	63.13	1,137.88	1802.46%	539.48	1,785.11	330.89%	56.88%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,665.89	384.61	23.09%	1,883.29	753.96	40.03%	96.03%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	-	0.01	#DIV/0!				
i. Migas	-	0.01	#DIV/0!				
- Gas Alam	-	0.01	#DIV/0!				
c. PNBP Lainnya	635.54	226.62	35.66%	800.11	509.08	63.63%	124.64%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	1,030.35	157.98	15.33%	1,083.19	244.88	22.61%	55.00%
II. Hibah	0	0.00	0	0	0.00	0	0
B. Belanja Negara	61,235.92	23,064.88	37.67%	59,844.37	21,239.50	35.49%	-7.91%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21,074.06	6,717.87	31.88%	19,997.63	6,199.20	31.00%	-7.72%
1. Belanja Pegawai	8,982.86	3,453.04	38.44%	9,180.48	3,489.49	38.01%	1.06%
2. Belanja Barang	7,283.23	2,023.94	27.79%	6,977.08	1,824.50	26.15%	-9.85%
3. Belanja Modal	4,769.34	1,233.77	25.87%	3,793.20	877.94	23.15%	-28.84%
4. Pembayaran Kewajiban Utang	0	0.00	0	0	0	0	0
5. Subsidi	0	0.00	0	0	0.00	0	0
6. Belanja Hibah	0	0.00	0	0	0.00	0	0
7. Bantuan Sosial	38.64	7.12	18.43%	46.87	7.28	15.52%	2.16%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	40,161.86	16,347.01	40.70%	39,846.75	15,040.30	37.75%	-7.99%
A. Transfer ke Daerah	35,636.57	15,362.82	43.11%	35,449.96	13,839.49	39.04%	-9.92%
a. Dana Perimbangan	35,190.02	15,326.04	43.55%	35,318.46	13,816.37	39.12%	-9.85%
i. Dana Transfer Umum	24,264.66	11,523.58	47.49%	24,566.37	11,410.19	46.45%	-0.98%
- Dana Bagi Hasil	1,577.23	866.08	54.91%	1,874.44	177.54	9.47%	-79.50%
- Dana Alokasi Umum	22,687.43	10,657.50	46.98%	22,691.93	11,232.65	49.50%	5.40%
ii. Dana Transfer Khusus	10,925.36	3,802.47	34.80%	10,752.09	2,406.18	22.38%	-36.72%
- Dana Alokasi Khusus Fisik	2,975.40	81.92	2.75%	3,059.24	52.33	1.71%	-36.11%
- Dana Alokasi Khusus NonFisik	7,949.96	3,720.55	46.80%	7,692.85	2,353.85	30.60%	-36.73%
b. Dana Insentif Daerah	446.54	36.78	8.24%	131.51	23.12	17.58%	-37.15%
c. Dana Otsus dan Keistimewaan	0	0.00	0	0	0.00	0	0
B. Dana Desa	4,525.29	984.19	21.75%	4,396.78	1,200.81	27.31%	22.01%
C. Keseimbangan Primer	0	0.00	0	0	0.00	0	0
D. Surplus/Defisit Anggaran	-32,582.18	-16,765.91	51.46%	-32,227.78	-5,523.62	17.14%	-67.05%
E. Pembiayaan	0	0	0	0	14,454,859.00	0	0

Sumber : aplikasi OM-SPAN, aplikasi SIMTRADA, Kanwil DJP Sumut dan Kanwil DJBC Sumut (diolah)



PROYEKSI DAN CAPAIAN PENERIMAAN

Proyeksi Penerimaan pada bulan Mei 2022 *understated* sebesar **Rp 489,6 miliar** [realisasi Pajak lebih rendah Rp26,03 miliar, realisasi Bea Cukai lebih rendah Rp340,45 miliar, dan realisasi PNPB dan Hibah lebih rendah Rp123,12 miliar]. Pada bulan Juni 2022, penerimaan pajak diproyeksikan Rp4,22 T, Bea Cukai Rp0,67 T dan PNPB/Hibah Rp0,22 T.

*Dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Pajak				Bea Cukai				PNBP dan Hibah				
		Real	Proy	Real	Dev	Real	Proy	Real	Dev	Real	Real	Proy	Real	Dev
		2021	2022	2022		2021	2022	2022		2020	2021	2022	2022	
1	Januari	880,431,647	2,048,358,721	2,407,553,303	17.54%	243,758,599	181,080,582	533,435,764	194.58%	111,166,655	66,172,490	360,650,306	118,687,534	-67.09%
2	Februari	1,202,299,106	1,545,174,923	2,084,944,659	34.93%	249,624,119	379,479,246	445,892,888	17.50%	109,854,051	68,084,397	322,796,149	72,290,523	-77.60%
3	Maret	1,216,868,308	1,662,938,760	2,457,916,005	47.81%	438,804,336	553,674,391	651,608,376	17.69%	197,292,032	250,340,293	91,716,292	254,767,712	177.78%
4	April	2,204,997,472	2,325,335,483	5,623,475,706	141.84%	584,379,170	742,283,308	639,325,774	-13.87%	203,019,718	116,135,119	170,249,544	200,578,475	17.81%
5	Mei	1,456,680,031	3,848,465,860	3,822,437,563	-0.68%	462,599,682	658,157,900	317,710,877	-51.73%	76,797,801	117,926,862	228,819,907	105,697,000	-53.81%
6	Juni	1,107,214,209	4,226,229,380			447,208,320	670,896,440			207,996,415	217,917,826	218,461,804		
7	Juli	947,807,843	4,226,229,380			523,680,903	683,634,980			87,628,227	168,945,836	226,183,299		
8	Agustus	1,380,956,483	4,367,890,700			414,281,256	696,373,520			118,707,252	133,185,345	225,618,312		
9	September	1,540,840,657	4,438,721,360			605,099,860	709,112,060			195,609,769	229,048,198	228,631,578		
10	Oktober	1,471,215,218	4,533,162,240			578,467,548	721,850,600			211,777,254	175,350,096	230,138,211		
11	November	2,388,141,832	4,627,603,120			613,132,956	734,589,140			132,724,506	205,537,069	232,209,832		
12	Desember	1,890,887,171	4,722,044,000			761,723,876	749,450,770			184,748,768	411,134,303	234,093,123		
TOTAL		23,610,217,541	42,572,153,927	16,396,327,236		5,922,760,625	7,480,582,937	2,587,973,679		1,837,322,448	2,159,777,834	2,769,568,356	752,021,244	

Deviasi Pajak sebesar minus Rp26,03 m disebabkan oleh menurunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berkontraksi cukup dalam sebesar 77.04% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

Deviasi Bea Cukai sebesar minus Rp340,45 m disebabkan oleh turunnya penerimaan Cukai sebesar Rp53,56 m atau sebesar 11,59% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)





PROYEKSI DAN CAPAIAN PENGELUARAN

Proyeksi Belanja pada bulan Mei 2022 *overstated* sebesar **Rp1,38 triliun** [realisasi Belanja K/L lebih rendah Rp531,29 miliar dan realisasi TKDD lebih rendah Rp845,82 miliar. Pada bulan Juni 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp1,96T dan TKDD Rp3,34 T.

**Dalam ribuan rupiah*

No	Bulan	Belanja K/L				TKDD			
		Real 2021	Proy 2022	Real 2022	Dev	Real 2021	Proy 2022	Real 2022	Dev
1	Januari	554.217.394	1.345.208.432	565.144.043	-57,99%	2.625.700.584	3.283.371.988	2.934.942.313	-10,61%
2	Februari	1.297.934.878	1.497.089.523	956.799.668	-36,09%	2.755.433.996	3.032.337.479	2.250.508.641	-25,78%
3	Maret	2.581.572.364	1.607.045.013	1.388.151.323	-13,62%	3.656.191.878	2.542.222.486	3.010.914.279	18,44%
4	April	2.206.691.530	1.809.785.286	2.044.085.860	12,95%	2.999.178.301	2.868.965.814	3.445.713.916	20,10%
5	Mei	3.528.973.531	1.775.789.319	1.244.502.794	-29,92%	4.322.137.095	3.239.540.565	2.393.723.406	-26,11%
6	Juni	2.420.519.847	1.957.767.729			3.999.156.675	3.339.157.434		
7	Juli	2.191.053.003	1.919.772.237			1.712.264.530	3.291.341.337		
8	Agustus	2.294.996.830	1.989.763.933			3.173.930.167	3.315.249.386		
9	September	2.580.610.931	2.007.761.798			3.618.233.211	3.303.295.361		
10	Oktober	4.062.780.763	2.049.756.816			5.490.375.662	3.307.280.036		
11	November	3.052.910.887	2.081.753.020			3.602.786.987	3.307.280.036		
12	Desember	4.736.300.686	2.117.748.749			3.326.757.292	3.307.280.036		
TOTAL		31.508.562.644	22.159.241.855	6,198,683,688		41.282.146.378	34.853.949.971	14,035,802,555	

Deviasi Belanja K/L sebesar minus Rp531,29 miliar yang disebabkan penurunan Belanja Barang sebesar 9,85% atau Rp199,44 miliar dan penurunan Belanja Modal sebesar 28,84% atau Rp355,83 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

Deviasi TKDD sebesar minus Rp845,82 miliar yang disebabkan karena menurunnya hamper Sebagian besar komponen realisasi Transfer ke Daerah

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

APBD DAN KINERJA TKDD





Kinerja APBD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d Mei 2022

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
Pendapatan Daerah	57,225.42	10,686.99	18.68%
PAD	14,636.05	3,136.00	21.43%
Pajak Daerah	11,337.70	2,841.93	25.07%
Retribusi Daerah	752.87	46.65	6.20%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	708.09	157.18	22.20%
Lain-Lain PAD yang Sah	1,837.39	90.24	4.91%
Pendapatan dari Dana Transfer	39,183.15	7,547.68	19.26%
Lain-Lain Pendapatan Daerah	3,406.22	3.31	0.10%
Belanja Daerah	59,502.32	8,595.82	14.45%
Belanja Pegawai	21,766.31	4,486.56	20.61%
Belanja Barang Jasa	14,936.25	1,302.97	8.72%
Belanja Modal	9,303.59	403	4.33%
Belanja Lainnya	13,496.18	2,403.30	17.81%
Belanja Bunga	44.29	4.6	10.39%
Belanja Subsidi	2.69		0.00%
Belanja Hibah	3,117.25	619.56	19.88%
Belanja Bantuan Sosial	253.60		0.00%
Belanja Tidak Terduga	655.63	26.55	4.05%
Belanja Bagi Hasil	2,745.72	1,229.18	44.77%
Belanja Bantuan Keuangan	6,676.99	523.41	7.84%
Surplus/(Defisit)	(2,276.91)	2,091.16	-91.84%
Pembiayaan Daerah	2,921.31	97.2	3.33%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	3,253.37	262.24	8.06%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2,126.03	195.91	9.21%
Penerimaan Pinjaman Daerah	1,112.14	66.32	5.96%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	15.20	0.01	0.07%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	332.06	165.04	49.70%
Penyertaan Modal Daerah	224.19	132.99	59.32%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	101.52	32.05	31.57%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan			
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.35		0.00%

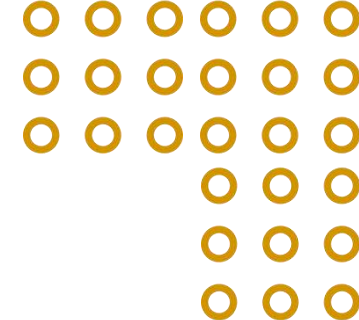
(miliar rupiah)

JENIS TKDD	PAGU	REALISASI	%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	1,874.44	177.54	9.47%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	22,691.93	11,232.65	49.50%
3. DAK Fisik	3,059.24	52.33	1.71%
4. DAK Non Fisik	7,692.85	2,353.85	30.60%
5. DID	131.51	23.12	17.58%
6. Dana Desa	4,396.78	1,200.81	27.31%
JUMLAH	39,846.75	15,040.30	37.75%

1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp10.686,99 miliar didominasi oleh komponen Pajak Daerah sebesar Rp2.841,93 miliar dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.547,68 miliar.
2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp8.595,82 miliar didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp4.486,56 miliar.
3. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp7.547,68 atau 30,62% dari total Realisasi APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sumatera Utara
4. Per 31 Mei 2022, alokasi dana TKDD sebesar Rp39,84 triliun telah realisasi sebesar Rp15,04 triliun (37,75%).
5. Dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan pagu TKDD sebesar Rp1,97 triliun dan terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp0,61 triliun.

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id dan aplikasi OM-SPAN





Kinerja APBD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d Mei 2022

No	Daerah	PAGU DAK Fisik	Realisasi
1	PROVINSI SUMATERA UTARA	330,88	
2	KAB. ASAHAN	95,70	
3	KAB. DAIRI	172,32	
4	KAB. DELI SERDANG	89,45	
5	KAB. KARO	92,10	
6	KAB. LABUHANBATU	51,32	
7	KAB. LANGKAT	81,44	
8	KAB. MANDAILING NATAL	96,81	
9	KAB. NIAS	117,58	
10	KAB. SIMALUNGUN	207,96	
11	KAB. TAPANULI SELATAN	56,20	
12	KAB. TAPANULI TENGAH	110,99	15.43
13	KAB. TAPANULI UTARA	69,16	6.12
14	KAB. TOBA	95,64	
15	KOTA BINJAI	40,42	
16	KOTA MEDAN	34,67	
17	KOTA PEMATANG SIANTAR	50,10	
18	KOTA SIBOLGA	33,00	
19	KOTA TANJUNG BALAI	31,31	
20	KOTA TEBING TINGGI	50,03	
21	KOTA PADANGSIDIMPUAN	22,36	
22	KAB. PAKPAK BHARAT	66,29	0.84
23	KAB. NIAS SELATAN	125,39	
24	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	131,13	7.44
25	KAB. SERDANG BEDAGAI	143,96	
26	KAB. SAMOSIR	83,11	8.26
27	KAB. BATU BARA	67,51	
28	KAB. PADANG LAWAS	57,73	6.94
29	KAB. PADANG LAWAS UTARA	69,99	
30	KAB. LABUHANBATU SELATAN	65,19	
31	KAB. LABUHANBATU UTARA	44,78	
32	KAB. NIAS UTARA	76,66	
33	KAB. NIAS BARAT	154,99	2.47
34	KOTA GUNUNGSITOLI	43,08	4.84

(miliar rupiah)

REKOMENDASI:

- Mendorong Kepala Daerah untuk memberikan instruksi percepatan realisasi TKDD, khususnya penyaluran DAK Fisik, DID dan Dana Desa.
- Mendorong Pemda untuk meningkatkan koordinasi internal antar instansi yang terlibat dalam penyaluran TKDD.
- Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk mengelola penyaluran TKDD.
- Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda terkait penyaluran TKDD
- Menginformasikan TKDD kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi.

Sumber : Aplikasi SIMTRADA





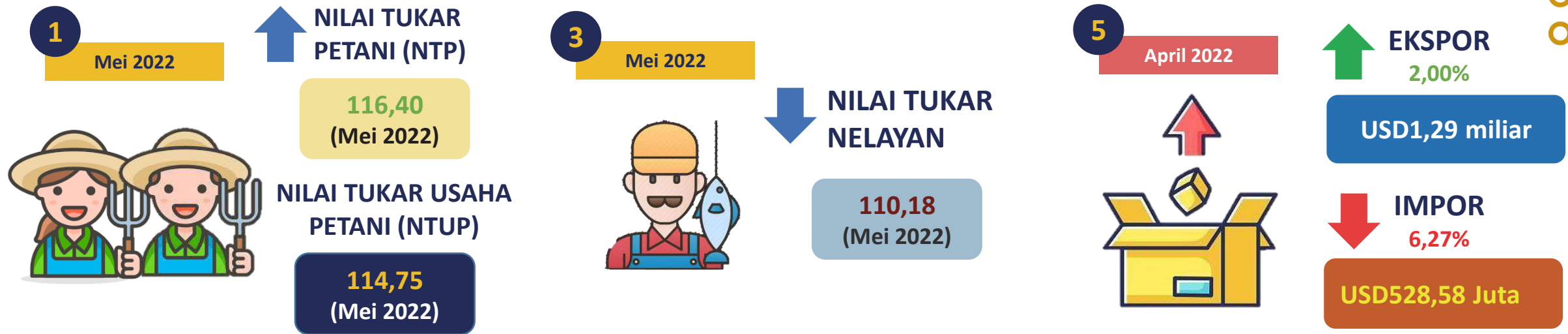
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL





PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA



Rekomendasi:
Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota serta provinsi dalam menciptakan aglomerasi industri dalam rangka meningkatkan perekonomian Sumatera Utara

PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

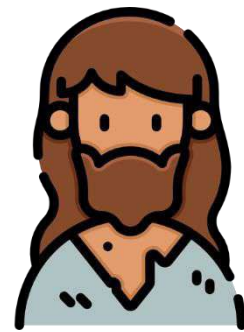
6
September 2021



LAJU
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

1,23%

8
September 2021



PERSentase
PENDUDUK MISKIN

8,49%

10
Februari 2022



TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA

5,47%

7
Desember 2021



INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA

72

9
September 2021



GINI RATIO

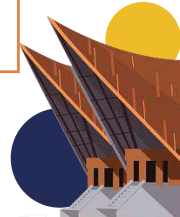
0,313

11
ANGKA
PARTISIPASI
SEKOLAH



- USIA 7-12: ↑ 99,32%
- USIA 13-15: ↑ 96,99%
- USIA 16-18: ↓ 78,66%
- USIA 19-24: ↑ 27,05%

Sumber: BPS, data diolah 2022





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Current Issues & Strategic Issues di Regional Provinsi Sumatera Utara





Current Issues di Regional Sumatera Utara

1. Kebijakan perubahan tarif PPN 10% menjadi 11% akan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN sebesar Rp11,46 triliun. tetapi disisi lain, kenaikan PPN berpotensi terhadap naiknya inflasi, namun kenaikan tersebut dirasa tidak akan signifikan. Pengaruh perubahan tarif PPN tersebut baru dapat terlihat pada bulan mendatang.
2. Berbeda dengan perubahan tarif PPN 11%, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tentunya akan sangat berpengaruh pada tingkat inflasi Sumatera Utara karena kenaikan harga BBM memiliki efek domino yang lebih besar. Kenaikan BBM akan mempengaruhi harga-harga komoditas, dan juga akan berpengaruh kepada permintaan barang-barang komoditas unggulan yang rutin di ekspor, salah satunya adalah komoditas unggulan ekspor pertanian seperti minyak sawit, karet dan kopi. Efek domino tersebut akan berdampak pada tingkat inflasi nasional, karena pada tahun 2021 nilai ekspor komoditas pertanian di Sumut merupakan yang tertinggi di Indonesia.





Strategic Issues di Regional Sumatera Utara





Update Penanganan Covid di Regional Sumatera Utara s.d 31 Mei 2022

KASUS POSITIF KUMULATIF



75

KASUS
AKTIF



Turun **58,79%**
dibanding bulan
sebelumnya

Sumut : 155.067
Nasional : 6.046.796

TOTAL SEMBUH

151.738

Meningkat 176
dibanding bulan
April 2022

VAKSINASI SUMUT



Dosis 1 : 10.920.130 (95.63%)
Dosis 2 : 9.293.598 (81.38%)
Dosis 3 : 2.406.287 (21,07%)

Sumber : <https://github.com> dan <https://covid19.sumutprov.go.id>





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Policy Response





Policy Response

No.	Permasalahan Fiskal	Dampak Negatif yang mungkin timbul	Rekomendasi
1.	Kenaikan PPH Badan, PPN dan PPN OP, serta perubahan peruran perpajakan yang berlaku tanggal 1 April 2022, seperti: - PMK- 42/PMK.010/2022 - PMK- 71/PMK.03/2022 - PMK- 70/PMK.03/2022 - PMK-65/PMK.03/2022 - Dll PMK lainnya	Ditengah pemulihan perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19, kenaikan tarif perpajakan dan kenaikan harga komoditas dapat memberatkan masyarakat dan berdampak pada dunia usaha serta konsumsi masyarakat.	• Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta assessment dampak kenaikan Tarif perpajakan tersebut terhadap tingkat konsumsi masyarakat.
2	Anggaran Belanja yang telah ditetapkan untuk TA. 2022 pada tahun 2021, dirancang dengan menggunakan PPN 10%. Dengan adanya kebijakan peningkatan tarif PPN 11% akan berpengaruh kepada DIPA masing-masing Satker.	Peningkatan tarif PPN 11% dapat membuat kekurangan anggaran belanja K/L sebagai efek dari kenaikan tarif PPN tersebut.	Perlu dilakukan revisi DIPA atau penambahan anggaran belanja K/L.

Sumber : northsumatrainvest.id





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



TERIMA KASIH

